

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Skripsi

*Diajukan untuk Melakukan Penelitian Skripsi pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TIARA KASMAN

19 0401 0040

Pembimbing:

Muhammad Ikram, S.Ak., M.Si.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Skripsi

*Diajukan untuk Melakukan Penelitian Skripsi pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TIARA KASMAN

19 0401 0040

Pembimbing:

Muhammad Ikram, S.Ak., M.Si.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tiara Kasman
Nim : 19 0401 0040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



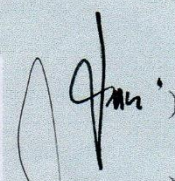
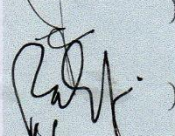
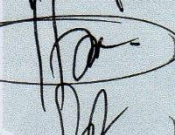
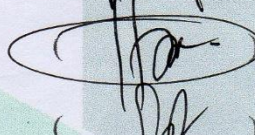
Tiara Kasman
NIM 19.0401 0040

HALAMAN PENGESAHAN

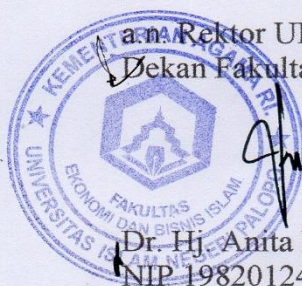
Skripsi berjudul Analisis Kebijakan Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang ditulis oleh Tiara Kasman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010040, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 18 September 2025 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 08 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H. I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag. M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Alwi, S.E., Sy, M.E.I
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Untuk Budidaya Jahe Dengan Konsep Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Rudi Rusmana dan Ibunda Liana Bone, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendukung peneliti dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh peneliti sadari tidak mampu membalas semua itu,

hanya do'a yang dapat peneliti persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., serta selalu mendoakan peneliti setiap saat memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.E., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si.Ak., C.A. selaku Penasihat Akademik.

5. Kepada Muhammad Ikram, S.Ak.,M.Si. selaku pembimbing yang mana telah bersedia telaten dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun penelitian ini.
6. Kepada Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Penguji 1 dan kepada Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku Penguji 2 yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.A., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepada keluarga besarku yang tercinta terima kasih karena selalu memberikan bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat melalui rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Tiwi, Ismi, Dilla, Tami dan Fitra yang selama ini selalu mengarahkan, membantu, menyemangati, dan menemani peneliti di masa-masa sulit selama proses penyelesaian dalam skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Aamin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegagan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 07 November 2024

Tiara Kasman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>Fathahdanalifatauaya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>Kasrahdanya'</i>	ī	I dan garis di atas
اِى	<i>Dammahdanwau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* _

نَجَّيْنَا : *najjaina* _

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمَرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billah* _
dinullah بِاللهِ

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ _
hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur 'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

AbuuuNashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulis menjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
1.2 Landasan Teori.....	12
1.3 Kerangka Pikir.....	42
1.4 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Populasi Dan Sampel.....	44
3.4 Data Dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Definisi Operasional	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.2 Pembahasan	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan	9
Tabel 2.2 Pajak berdasarkan sifat.....	39
Tabel 2.3 Pajak berdasarkan instansi pemungut	40
Tabel 2.4 Pajak objektif dan subjektif.....	40
Tabel 4.1 Kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2018-2022.....	50
Tabel 4.2 APBN dari 2018-2022	54
Tabel 4.3 Uji Normalitas	58
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.5 Uji t (Parsial)	59
Tabel 4.6 Uji F (Simultan)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	4
Gambar 2.1. Kerangka Pikir	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data

Lampiran 2. Analisis Data

Lampiran 3. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Kasmantiara, 2025. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Skripsi ini membahas pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022-2024. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan untuk membuktikan apakah APBN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi semua data pengeluaran pemerintah di Indonesia sampel sebanyak 34 provinsi selama 3 tahun terakhir dari tahun 2022-2024 sebanyak 204 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui perolehan data laporan data belanja pemerintah tahun 2022-2024. Data tersebut diperoleh dari badan atau lembaga yang resmi yakni Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan variabel APBN berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci : *Pajak, APBN, Pertumbuhan Ekonomi.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.¹ Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka Panjang.² Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB akan

¹ Seri Ekonomi Makro - Teori Pertumbuhan Ekonomi, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-seri-ekonomi-makro-teori-pertumbuhan-ekonomi/detail/>

² Sukirno, Sadono. 2020 Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru Raja. Grafindo Pustaka. Jakarta.

memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dalam suatu negara. Dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Maka tidak mengherankan lagi apabila pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Salah satu variabel tolak ukur kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan perekonomian.³ Jika perekonomian suatu negara stabil maka dapat dikatakan negara tersebut maju, sebaliknya jika keadaan perekonomian suatu negara terpuruk maka negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai negara maju.

Dalam hal kependudukan, Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah. Hal ini pula yang menjadi keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya. Jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,13%.⁴ Keadaan jumlah penduduk sebesar itu, tentu memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah / negara atau lembaga terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya, agar jumlah penduduk yang besar ini dapat berperan sebagai sumber daya pembangunan di

³ Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2020). *Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.

⁴ Jumlah data penduduk indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>

tiga tanah air. Jumlah penduduk di setiap wilayah/provinsi maupun pulau juga berbeda-beda, demikian juga dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula.

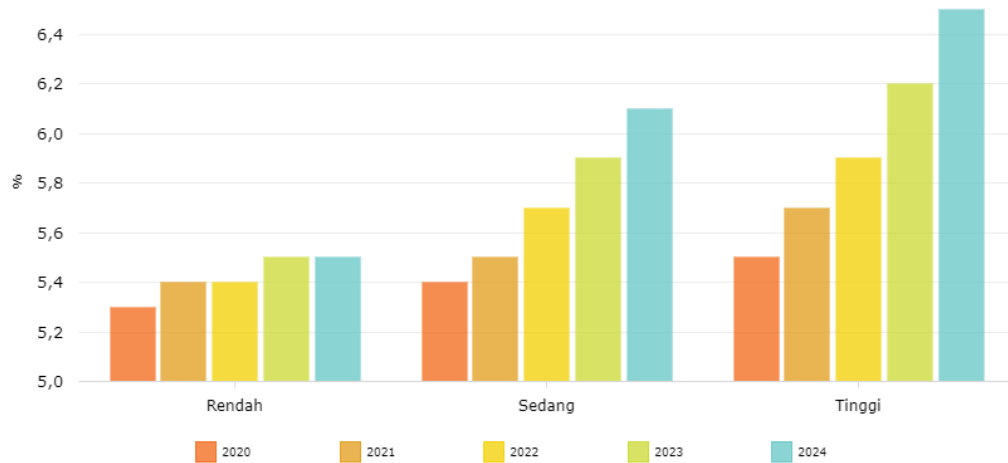
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan menjadi berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui redistribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2024 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), bersifat fluktuatif. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu menunjukkan peningkatan dan

perkembangan dalam perekonomian di Indonesia, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020-2024:

Gambar 1.1 Pertumbuhan ekonomi indonesi tahun 2020-2024



Sumber: Badan Statistik;bk

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bersifat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada grafik tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sangat rendah ini diketahui karena pada tahun 2020 Indonesia menghadapi musibah yaitu dengan munculnya wabah *covid-19*. Adanya dampak dari wabah tersebut memberikan resiko dan tantangan yang lebih bagi perekonomian Indonesia, sehingga mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir dampak yang terjadi. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai membaik dan di tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi meningkat

sampai di tahun 2024.⁵ Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh menurun atau meningkatnya nilai pada suatu sektor saja. Akan tetapi mengenai bagaimana kebijakan yang diterapkan di Indonesia itu sendiri. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara tergantung kepada banyak faktor seperti salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, ini harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya faktor tersebut dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Seperti negara lain pada umumnya, kebijakan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.⁶

Perekonomian berjalan dengan mengandalkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam konteks perekonomian Indonesia dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam upaya menekan fluktuasi siklus ekonomi dan berperan dalam menjaga ekonomi yang tumbuh dengan penggunaan tenaga kerja yang tinggi sehingga tidak terjadi laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.⁷ Penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan pemerintah terdiri atas penerimaan negara dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akan tetapi penerimaan pemerintah dari sektor pajak memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNBP, bahkan rasio rata-rata nya

⁵ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, sumber dari Badan Pusat Statistik

⁶ Zakik. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Pendapatan Perkapita. *Media Trend, Vol 8 No 1, ISSN: , 59-70.*

⁷ Harsasto, P., Widayati, W., Astuti, P., Martini, R., & H, N. R. (2021). *Ekonomi Pemerintahan*. Tangerang: Universitas Terbuka.

mencapai 75% - 80%. Pada umumnya, penerimaan pajak digunakan untuk menyediakan barang publik dan untuk mengatasi kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adanya pengeluaran diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi yang cenderung meningkat. Dampak kenaikan pengeluaran ini bisa berpengaruh terhadap perekonomian dengan melalui naiknya investasi seperti pembangunan infrastruktur.⁸

Pengeluaran pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah mampu menyediakan barang publik yang diharapkan sebagai input produksi yang baik. Pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia juga dihadapkan pada dua pilihan yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak, kebijakan ini ditujukan untuk merangsang perekonomian disaat terjadi resesi dan terdapat banyak pengangguran. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah, kebijakan ini ditujukan unu memperlambat perekonomian yang berarti kebijakan ini dilakukan disaat laju inflasi cukup tinggi.⁹

⁸ Listyowati, L. (2020). Dinamika Kebijakan Fiskal dan Moneter serta Dampaknya bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1988-2017. 1-13.

⁹ Harsasto, P., Widayati, W., Astuti, P., Martini, R., & H, N. R. (2021). *Ekonomi Pemerintahan*. Tangerang: Universitas Terbuka.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pentingnya peranan kebijakan fiskal dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Apakah penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.
2. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ataupun acuan dalam penelitian selanjutnya yang membahas aspek yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman tentang penelitian khusus pada bidang pertumbuhan ekonomi.

3. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Penulis & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Cahyani(2021), telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh APBN, Kebijakan Fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di masa Pandemi” ¹⁰	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh APBN, kebijakan fiskal, dan hutang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi.	Variabel yang diteliti	Teknik analisis data yang digunakan.
2.	Sihaloho (2020) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh penerimaan	Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap	Variabel penelitian yang diteliti	- Teknik penelitian yang digunakan

¹⁰ Cahyani(2021).*Pengaruh APBN, Kebijakan Fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di masa Pandemi*

pajak terhadap	pertumbuhan ekonomi	- Jumlah	
pertumbuhan ekonomi	di Indonesia. Selain itu,	sampel yang	
Indonesia: pendekatan	penelitian ini	diteliti	
vektor	memberikan hasil		
autoregressive”. ¹¹	bahwa variabel tingkat		
	inflasi memiliki		
	pengaruh namun kearah		
	negatif terhadap		
	variabel pertumbuhan		
	ekonomi di Indonesia.		
3. Aristina khusni (2020)	Hasil penelitian	Jenis	Jumlah
telah melakukan	menunjukkan dalam	penelitian	variabel yang
penelitian dengan	jangka panjang variabel	yang	diteliti
judul “Analisis	suku bank, uang yang	digunakan	
Kebijakan Moneter	beredar, penerimaan		
dan Kebijakan Fiskal	pajak, dan pengeluaran		
terhadap Pertumbuhan	pemerintah terdapat		
Ekonomi di Indonesia	pengaruh yang		
tahun 2005-2018”. ¹²	signifikan terhadap		
	pertumbuhan ekonomi di		

¹¹ Sihaloho (2020). *Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: pendekatan vektor autoregressive*.

¹² Khusni Aristina(2020).*Analisis Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018*.

		indonesia.		
4.	Wijaya kusuma (2019), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, dan pengangguran”. ¹³	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sudah dampak positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, dampak signifikan positif pada kesejahteraan sosial, dan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan berdampak pada kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi positif dampak signifikan terhadap kesejahteraan, positif tidak signifikan berdampak pada kemiskinan dan dampak	Jenis variabel yang digunakan	Variabel yang diteliti

¹³ Kusuma Wijaya (2018), *Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, dan pengangguran*.

signifikan positif tentang
pengangguran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat

proses pertambahan keluaran wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah makin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*)

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi di suatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan dalam suatu pembangunan. Pertumbuhan dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun.¹⁴

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan oleh Simon Kuznets, seorang ahli ekonomi terkemuka di Amerika Serikat yang pernah memperoleh hadiah Nobel menyatakan bahwa, proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakannya sebagai Modern Economic Growth dimana dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perkembangan

¹⁴ Salim(2019).Hukum Investasi Indonesia,hlm: 31-33

pembangunan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB atas harga konstan.

Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang di hasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu. GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang di produksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, GDP sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara dan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lain dengan mengkonversikannya menjadi satu mata yang sama.¹⁵ Teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory) dipelopori oleh Paul M. Romer yang menemukan model pertumbuhan endogen ala Romer (1989) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi public dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik,

¹⁵ Richard, & Toly, A. A. (2019). Analisa Korelasi Inflasi, Economic Growth, Economic Structure, dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue di Negara-Negara Asean, 3(2), 1–12

kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercipta dengan bekerjanya pasar yang secara efisien. Mekanisme pasar dapat bekerja secara efisien jika tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang terlaksana dengan baik. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prsetasi dari perkembangan suatu ekonomi.

Berikut teori-teori pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Teori Neoklasik

Teori Neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T. W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2. Teori Klasik

Teori Klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18 Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa

perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua unsur utama yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Teori ekonomi klasik lahir sebagai tonggak pertama dalam pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Teori tersebut muncul karena adanya kelemahan dan kekurangan dari teori ekonomi sebelumnya.

3. Teori Historis

Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi diantaranya Karl Bucher, Werner Sombart, dan Frederich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu.

Faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi:

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunanya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya

alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis diantaranya Sumber Daya Alam Hayati (sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Sumber Daya Alam non Hayati sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam), sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali (Contoh sumber daya ini diantaranya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dengan jangka waktu yang lama (Minyak bumi, batu bara, dan gas alam), Terakhir sumber daya alam yang kekal yang tak akan habis (Contoh sumber daya ini diantaranya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi).

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber Daya Manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya namun lebih

kepada efisiensinya. Dalam mendorong Sumber Daya Manusia dapat bekerja secara efisien berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

- **Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM)** – Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Oleh karenanya memberikan motivasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu hal yang wajib dilakukan.
- **Sesuaikan Pekerjaan dengan Kemampuan dan Minat Sumber Daya Manusia (SDM)** – Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya terhadap sesuatu.
- **Program Pelatihan** – Memberikan program pelatihan kepada para Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan membantu meningkatkan skillnya. Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran serta sesuai dengan data yang valid. Perpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal.
- **Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkala** – Dalam mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam periode yang ditentukan, diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki.

Ekonomi Sumber Daya Manusia juga dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

c. Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antara Akumulasi Modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam model pertumbuhan ekonomi Harod-Domar meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

d. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

e. Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab Perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), modal, hingga faktor produksi lainnya.

f. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat

menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu Aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, Tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi. Sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Karenanya hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib.

4. Metode Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam focus perhatian untuk kemudian ditingkatkan secara terus menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah serta jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan menuju keadaan yang lebih baik serta sejahtera sejahtera dari waktu ke waktu bagi para rakyatnya. Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pendapatan riil nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu indikator lainnya adalah pendapatan riil per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif. Tak hanya itu

kesejahteraan penduduk juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebab terkait pendapatan riil per kapita. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat ekonomi ke arah yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Tersedianya lapangan kerja kemudian akan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga secara otomatis, saat hal ini terjadilah pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara terjadi. Artinya, produktivitas meningkat.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

1. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun, dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam *Gross National Product* (GNP), sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam *Gross National Product* (GNP).

Pendapatan yang termasuk dalam *Gross National Product* (GNP) juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau *Gross National Product* (GNP) adalah dengan cara membandingkan *Gross National Product* (GNP) di periode ini

dengan *Gross National Product* (GNP) pada periode sebelumnya. Misalnya jika ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 maka harus mengetahui berapa jumlah *Gross National Product* (GNP) yang didapat Indonesia di tahun 2020 dan *Gross National Product* (GNP) pada tahun 2019. Berikut ini visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan PDB atau GNP:

Keterangan:

R : Persentase pertumbuhan ekonomi suatu Negara

GNP : GNP suatu Negara

GNPy-1: GNP/PNB suatu negara pada tahun sebelumnya

2. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Jika Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP). Meski demikian pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk ke hitungan GDP.

Rumus menghitung pertumbuhannya pun hampir sama dengan menggunakan *Gross National Product* (GNP) dimana dilihat perbandingan antara *Gross Domestic Product* (GDP) di periode tersebut terhadap *Gross Domestic*

Product (GDP) di periode sebelumnya. Misalnya ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka perlu memiliki data Gross Domestic Product (GDP) di tahun 2020 dan Gross Domestic Product (GDP) di tahun 2019. Berikut adalah visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Gross National Product (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara:

Keterangan:

R : Persentase pertumbuhan ekonomi suatu Negara

GDP : GDP suatu Negara

GDPy-1: GDP/PDB suatu negara pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran sekaligus ukuran penting mengenai tolak ukur bagaimana kondisi suatu negara, yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, kita dapat memahami bagaimana kondisi suatu negara secara garis besar apakah berada dalam keadaan yang baik atau tidak.

Dalam kegiatan suatu perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti peningkatan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, peningkatan produksi sektor jasa, dan peningkatan peroduksi barang modal. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentase pertambahan pendapatan rill. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan

nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.

2.2.2 Kebijakan Fiskal

Secara bahasa kata kebijakan dalam KBBI memiliki arti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga berarti serangkaian konsep yang menjadi landasan atau dasar dari rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak yang umumnya dilakukan oleh pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga bisa diartikan cita-cita, sebuah tujuan, prinsip atau juga maksud yang menjadi panduan dalam sebuah manajemen. Karena itu kebijakan umumnya diterapkan pada suatu hal yang memerlukan manajemen kompleks, kebijakan dipakai sebagai panduan untuk melakukan manajemen itu sendiri.

Sementara kata fiskal secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*fisc*" yang memiliki arti perbendaharaan atau pengaturan untuk keluar masuknya uang di sebuah pemerintahan, atau negara atau juga kerajaan. Konon kata fiskal ini berasal dari bahasa Yunani "*fiscus*" yang merupakan nama seorang pejabat di kerajaan Romawi Kuno, fiscus saat itu bertugas sebagai orang yang mengatur keuangan kerajaan. Sementara dalam Bahasa Indonesia, fiskal memiliki arti suatu hal yang memiliki hubungan erat dengan urusan perpajakan dan pengelolaan pendapatan negara. Karena itu, secara bahasa fiskal selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan yang bisa termasuk pula perpajakan.

Secara istilah, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin sebuah Negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara.

Selain itu kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara. Dana yang terkumpul tersebut dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan dan kemudian digunakan sebagai pengeluaran melalui program yang dibuat pemerintah. Program yang dibuat pemerintah tersebut bertujuan untuk dapat menghasilkan capaian atas pendapatan nasional, produksi serta perekonomian dan digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan di perekonomian negara atau kerajaan tersebut.

Menurut beberapa ahli seperti Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah telah diatur jelas dalam undang-undang sebagai pembiayaan umum pemerintah, tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi pemerintah serta tidak mengandung unsur imbalan secara individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak tersebut.

Sedangkan menurut Alam, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi tersebut.

Haryadi pun mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Menurutny kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk dapat mengarahkan

perekonomian dari suatu negara. Tujuannya adalah untuk menuju arah yang lebih baik sesuai dengan yang pemerintah tersebut inginkan. Caranya adalah dengan mengubah penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah negara itu. Singkatnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik. Untuk memahami lebih dalam mengenai perumusan kebijakan fiskal di masa mendatang.

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah manuver kebijakan untuk menahan laju pelemahan ekonomi setahun terakhir. Banyak istilah-istilah yang mungkin belum *Grameds* ketahui terkait langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tersebut. Salah satu yang sering terdengar namun kurang awam di telinga masyarakat adalah pemerintah didorong untuk melonggarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi dari suatu negara.

Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti kementerian perdagangan, lembaga investasi sampai lembaga independen seperti otoritas jasa keuangan (OJK) dan lembaga penjamin simpanan (LPS). Lembaga-lembaga tersebut berwenang untuk mengatur berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor impor dan sebagainya. Sebaliknya, kebijakan moneter umumnya merupakan pengaturan ekonomi oleh pemerintah melalui tindakan mengontrol peredaran uang dan

mengatur tingkat suku bunga. Baik fiskal maupun moneter sama-sama mengintervensi perekonomian, namun kebijakan moneter cenderung mempengaruhi harga, keuangan dan konsumsi masyarakat serta beberapa sektor riil. Lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter adalah bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI). Contoh kebijakan moneter ialah kontrol terhadap tingkat suku bunga, sehingga ketika BI menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, umumnya akan mempengaruhi sejumlah sektor misalnya penjualan rumah, penjualan kendaraan dan sektor perbankan.

Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh. Bisa dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁶

Menurut I Wayan Sudirman dalam bukunya Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal yang dikutip dari Kompas, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Sebagai contoh, salah satu instrumen pemasukan negara adalah pajak.¹⁷ Untuk mengatur besaran penetapan pajak bagi wajib pajak, DPR akan mengadakan rapat untuk membuat kebijakan fiskalnya. Setelah itu, pelaksanaan hasil strategi harus ditaati oleh seluruh wajib pajak sementara pemungutan dan pengawasannya dilakukan

¹⁶ Kebijakan fiskal: definisi, tujuan, jenis dan contohnya., <https://www.rumah.com/panduan-properti/kebijakan-fiskal-74814>

¹⁷ I Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan Moneter

oleh aparat pemerintah. Kebijakan fiskal biasanya diambil pemerintah untuk membantu agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.

Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Sesuai dengan pengertiannya, kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sebuah kebijakan yang kredibel dan berdasarkan hasil pengkajian serta penelitian. Pembahasan mengenai proses perumusan sebuah kebijakan yang baik secara detail dibahas dalam buku *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesenambungan Fiskal*.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Ada beberapa tujuan kebijakan fiskal yakni:

1. Meningkatkan PDB (PDB negara dan PDB per kapita)

Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor. Sehingga semakin tumbuh pendapatan negara, semakin tumbuh sektor industri juga sektor ekonomi lainnya maka perekonomian suatu negara akan meningkat. Untuk mengukur tingkat perekonomian negara biasanya menggunakan perhitungan Gross domestic

Product (GDP) alias produk domestik bruto (PDB). Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di Asia yaitu Rp 15.434 triliun tahun 2020. Sementara nilai PDB negara semakin besar, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah juga akan mempengaruhi tingkat PDB per kapita atau pendapatan per kapita masyarakat yang juga semakin meningkat. Bersamaan dengan perekonomian yang terus tumbuh, sektor industri semakin besar dan pendapatan negara semakin besar maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan masyarakat juga akan semakin tumbuh karena pasar tenaga kerja tumbuh seiring meningkatnya tingkat pengupahan.

2. Meningkatkan serapan tenaga kerja

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka ini akan membantu mendongkrak perekonomian. Seiring berkembang ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang maka pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak. Semakin tumbuh ekonomi di dalam negeri maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya juga akan semakin banyak karena itu kebijakan fiskal juga akan mempengaruhi kondisi tenaga kerja. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong aliran investasi asing masuk ke Indonesia akan membantu pertumbuhan sektor industri semakin tinggi. Sektor industri tumbuh pesat, pabrik-pabrik baru dibangun sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.

Kebijakan fiskal yang tepat tentunya akan membantu penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini menjadi sangat penting di tengah kekhawatiran terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat jumlah penduduk yang menganggur di Indonesia pada periode Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Jumlah tersebut terus bertambah bahkan naik 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bersamaan dengan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, ini akan mendorong pada semakin banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. BPS juga merilis jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, jumlah tersebut juga mengalami penambahan dibandingkan Maret tahun lalu yang jumlahnya 26,42 juta orang.

3. Menjaga stabilitas harga

Pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat tiga komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak dan inflasi harga diatur pemerintah.

a. Meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran.

Salah satu masalah terbesar dalam perekonomian kita adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja baik

nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara.

b. Menjaga stabilitas harga

Kenaikan harga komoditas, mulai dari yang esensial seperti harga bahan bakar, sampai hal-hal terdekat kita seperti harga bahan masakan. Naik-turunnya harga tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar, sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat.

c. Memacu pertumbuhan ekonomi negara

Tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan menelurkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan.

d. Mendorong laju investasi

Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian yakni nilai investasi yang masuk ke negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak.

e. Mewujudkan keadilan sosial

Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan social.¹⁸ Contoh nyata dari hal tersebut yakni Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicetuskan oleh Kementrian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan, mampu bertahan dari dampak pandemi covid-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga, dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung.

Adapun instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro.¹⁹ Sektor-sektor tersebut antara lain:

1. Pajak

Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya jika pajak diturunkan, jumlah *output* barang dan jasa akan semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan *output* barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara, Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha

¹⁸I Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan Moneter

¹⁹ I Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan Moneter

untuk berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, dimana rakyat yang memiliki dana, ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman.

2.2.3 Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.²⁰ Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling utama dalam mendukung pembangunan, banyak factor yang menjadi penyebab meningkatnya kepatuhan wajib pajak.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat

²⁰ Pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

²¹ I isak,dkk(2024). Jurnal. Determinan kepatuhan wajib pajak.

subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila kamu adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.

4. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.²¹

²¹ Pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

a. **Pajak dari Perspektif Ekonomi**

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yaitu:

- 1) Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa
- 2) Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b. **Pajak dari Perspektif Hukum**

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam

membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a. **Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)**

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. **Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. **Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)**

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan *budgeter*. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.²²

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Self assessment berarti wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya.

²² Pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

Tabel 2.2 Pajak Berdasarkan Sifat

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)	Pajak Langsung (Direct Tax)
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. ²³	Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan

Sumber : Pajak.go.id

²³ Pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Tabel 2.3 Pajak berdasarkan Instansi Pemungut

Pajak Daerah (Lokal)	Pajak Negara (Pusat)
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.	Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).
Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan), dan pajak daerah lainnya. ²⁴	

Sumber : Pajak.go.id

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif.

Tabel 2.4 Pajak objektif dan subjektif

Pajak Objektif	Pajak Subjektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor,	Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan

²⁴ Pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

pajak kendaraan bermotor, bea dan pajak penghasilan.

meterai, dan masih lainnya.²⁵

Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

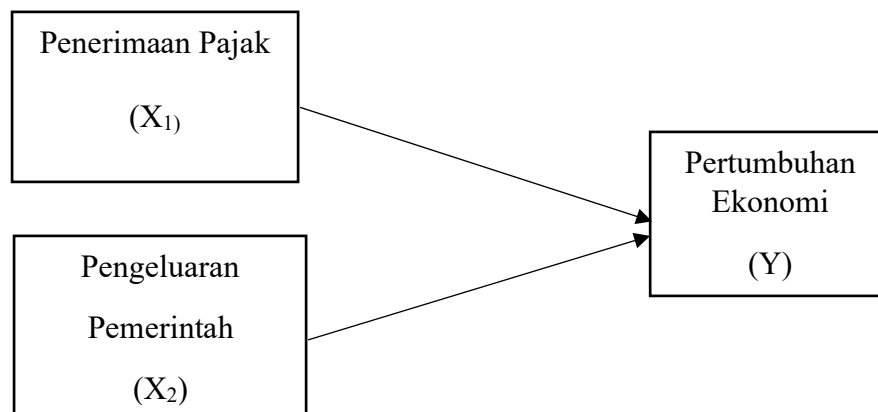
Sumber : Pajak.go.id

²⁵ Pengertian pajak, fungsi dan jenis-jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut;

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini membahas mengenai pengaruh kebijakan fiskal berupa variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif, dimana hipotesis asosiatif ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maka hipotesis penelitian ini yaitu;

- H₁ :Ada pengaruh kebijakan fiskal pada variabel penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- H₂ :Ada pengaruh kebijakan fiskal pada variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.
- H₃ :Ada pengaruh secara bersamaan kebijakan fiskal pada variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur, hubungan variabel bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berbentuk time series (runtut waktu) yang merupakan data tahunan selama tiga tahun dari tahun 2022-2024 dengan lokasi penelitian di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yang berlokasi di Indonesia yang berpusat pada Badan Pusat Statistik (BPS). Peneliti menetapkan waktu untuk melakukan penelitian ditahun 2025.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan suatu daerah yang umum didalamnya terdapat obyek dan subyek, memiliki kriteria tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu negara Indonesia.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari anggota suatu populasi yang diambil berdasarkan jumlah serta karakteristik tertentu dengan prosedur tertentu. Sampel adalah subkelompok dari suatu populasi yang akan diteliti, oleh karena itu suatu sampel harus mewakili dan juga memberikan gambaran yang benar tentang populasi.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampel* jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.²⁶ Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder tersebut berupa data tahunan 2022 – 2024. Dan hasil dari kajian pustaka yang mendukung penulisan penelitian ini yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian.

²⁶ Sugiyono (2020). Teknik sampling jenuh, <https://eprints.ummi.ac.id/1436/5/BAB%20III.pdf>

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi pemerintahan. Dengan teknik pengumpulan data melalui situs resmi pemerintahan atau perusahaan bisa lebih fleksibel dan dapat mengefesienkan waktu.

3.6 Defenisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.²⁷ Definisi operasional dalam penelitian ini ialah merujuk pada penjelasan bagaimana konsep-konsep kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dan diamati secara spesifik dalam konteks penelitian ini. Ini melibatkan penjelasan detail mengenai variabel independen (kebijakan fiskal) dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) serta bagaimana hubungan keduanya dianalisis.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier regliser rendah dengan bantuan *software* SPSS statistics, Metode-metode yang dingunakan yaitu uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, analisis linear berganda sederhana, uji hipotesis dan uji determinan:

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian dengan model regresi. Model regresi harus terbebas dari

²⁷ Rezki Ariersta Prabowo Prayonto(2021).
https://repository.stkippacitan.ac.id/eprint/661/5/RISKI%20ARIERSTA%20PRABOWO%20PRANYOTO_BAB%203%20PI2021.pdf. Diakses pada tanggal 08 juli 2024.

asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot dan Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t atau Pengujian Secara Parsial. Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Menggunakan uji masing-masing secara parsial terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas. Apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat.²⁸ Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai pada t tabel dan t hitung Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis

H0: Tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel (Y).

Ha: Ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

2. Menentukan t tabel dan t hitung

t tabel dengan tingkat=0,05

t hitung di dapat dari hasil perhitungan computer= $n-k-1$. Jadi didapat perhitungan Jadi. Df = $(100-3-1=96)$. Dengan demikian, nilai t tabel yang didapat adalah 1.660.

3. Keputusan

²⁸ Kartika(2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Pelanggan Go-Jek Di Perguruan Tinggi Negeri Kota Malang). Malang: Universitas Islam Negeri (UIN). Hal.223.

- a) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- b) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian

a. Penerimaan Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya kepada pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan mendukung berbagai proyek dan kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah. Berikut di bawah ini menggambarkan penerimaan pajak dari tahun 2022 ke tahun 2024.

Tabel 4.1 kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI	TAHUN	KENAIKAN PAJAK (RUPIAH)
1	SULAWESI SELATAN	2022	6,575,400
		2023	6,863,700
		2024	7,172,400
2	SULAWESI TENGAH	2022	2,433,600
		2023	2,538,200
		2024	2,647,600
3	SULAWESI TENGGARA	2022	3,836,300
		2023	3,911,500
		2024	3,989,900
4	SULAWESI BARAT	2022	3,325,200
		2023	3,379,700
		2024	3,437,400
5	SULAWESI UTARA	2022	3,134,900
		2023	3,267,500

		2024	3,408,700
6	GORONTALO	2022	3,032,400
		2023	3,076,700
		2024	3,124,100
7	MALUKU	2022	3,361,800
		2023	3,419,700
		2024	3,482,000
8	MALUKU UTARA	2022	3,836,300
		2023	3,870,800
		2024	3,906,800
9	PAPUA BARAT	2022	2,015,300
		2023	2,098,400
		2024	2,184,200
10	PAPUA	2022	3,237,200
		2023	3,367,500
		2024	3,501,600
11	KALIMANTAN BARAT	2022	5,776,600
		2023	6,026,400
		2024	6,291,400
12	KALIMANTAN TENGAH	2022	4,233,400
		2023	4,413,700
		2024	4,606,100
13	KALIMANTAN SELATAN	2022	6,388,900
		2023	6,663,900
		2024	6,957,100
14	KALIMANTAN TIMUR	2022	7,854,100
		2023	8,187,700
		2024	8,540,600
15	KALIMANTAN UTARA	2022	2,913,300
		2023	2,991,700
		2024	2,072,600
16	DKI JAKARTA	2022	5,838,700
		2023	5,107,400
		2024	5,510,200
17	JAWA BARAT	2022	3,689,100
		2023	3,007,400
		2024	3,384,600
18	JAWA TENGAH	2022	2,356,100

		2023	2,174,900
		2024	2,050,900
19	DI YOGYAKARTA	2022	9,482,800
		2023	9,864,500
		2024	9,621,800
20	JAWA TIMUR	2022	3,010,500
		2023	3,394,800
		2024	3,827,400
21	BANTEN	2022	3,711,900
		2023	4,278,800
		2024	4,873,600
22	BALI	2022	6,356,800
		2023	6,629,200
		2024	6,919,100
23	NUSA TENGGARA BARAT	2022	2,964,400
		2023	3,091,200
		2024	3,226,100
24	NUSA TENGGARA TIMUR	2022	2,324,700
		2023	2,418,000
		2024	2,515,500
25	KEPULAUAN RIAU	2022	2,543,400
		2023	2,645,200
		2024	2,749,900
26	BENGKULU	2022	2,300,800
		2023	2,396,400
		2024	2,494,900
27	LAMPUNG	2022	4,949,700
		2023	5,161,600
		2024	5,386,800
28	BANGKA BELITUNG	2022	2,135,300
		2023	2,221,100
		2024	2,309,000
29	RIAU	2022	3,516,750
		2023	3,695,650
		2024	3,807,600
30	JAMBI	2022	5,292,500
		2023	5,516,400
		2024	5,751,400

		2022	5,667,300
31	SUMATERA BARAT	2023	5,912,800
		2024	6,171,100
		2022	9,634,900
32	SUMATERA SELATAN	2023	10,014,800
		2024	10,414,850
		2022	6,845,700
33	ACEH	2023	7,120,350
		2024	7,409,550
		2022	5,667,300
34	SUMATERA UTARA	2023	5,912,800
		2024	6,171,100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Indonesia

Pendapatan dari pajak daerah di berbagai Provinsi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif. Sebagai contoh, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah dari Rp 6,575,400 pada tahun 2022 menjadi Rp 7,172,400 pada tahun 2024. Hal serupa terjadi pada semua provinsi di Indonesia, yang mengalami peningkatan pendapatan pajak daerah yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan pendapatan pajak daerah ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional dan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya fiskal untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah singkatan dari "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." Ini adalah sebuah rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam suatu periode tertentu,

biasanya satu tahun fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup semua sumber pendapatan negara, seperti pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan dana lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Berikut di bawah ini menggambarkan kenaikan tingkat APBN dari tahun 2022 ke tahun 2024.

Tabel 4.2 APBN dari tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI	TAHUN	TOTAL APBD (JUTA RUPIAH)
1	SULAWESI SELATAN	2022	9,631,040
		2023	10,374,681
		2024	12,548,451
2	SULAWESI TENGAH	2022	4,567,747
		2023	4,623,258
		2024	4,362,165
3	SULAWESI TENGGARA	2022	4,672,660
		2023	4,567,359
		2024	5,260,192
4	SULAWESI BARAT	2022	2,164,144
		2023	2,140,482
		2024	2,108,767
5	SULAWESI UTARA	2022	4,372,348
		2023	4,640,155
		2024	4,167,776
6	GORONTALO	2022	2,002,198
		2023	1,948,827
		2024	1,922,519
7	MALUKU	2022	3,137,388
		2023	3,384,152
		2024	4,021,218
8	MALUKU UTARA	2022	2,808,345
		2023	2,750,345
		2024	3,379,037

9	PAPUA BARAT	2022	12,420,607
		2023	11,572,152
		2024	7,744,110
10	PAPUA	2022	17,248,619
		2023	15,527,559
		2024	15,878,964
11	KALIMANTAN BARAT	2022	6,304,659
		2023	6,242,375
		2024	7,090,493
12	KALIMANTAN TENGAH	2022	5,680,470
		2023	5,377,960
		2024	5,020,296
13	KALIMANTAN SELATAN	2022	7,397,118
		2023	6,879,065
		2024	5,526,165
14	KALIMANTAN TIMUR	2022	13,637,013
		2023	12,382,489
		2024	11,616,186
15	KALIMANTAN UTARA	2022	2,797,918
		2023	2,778,925
		2024	2,385,057
16	DKI JAKARTA	2022	74,077,191
		2023	61,469,821
		2024	84,196,594
17	JAWA BARAT	2022	39,199,187
		2023	39,376,316
		2024	44,715,066
18	JAWA TENGAH	2022	27,490,557
		2023	26,513,084
		2024	27,383,751
19	DI YOGYAKARTA	2022	6,173,815
		2023	6,035,224
		2024	6,214,072
20	JAWA TIMUR	2022	38,411,057
		2023	36,022,542
		2024	33,044,298

21	BANTEN	2022	12,281,829
		2023	12,122,344
		2024	16,013,254
22	BALI	2022	7,350,130
		2023	6,550,978
		2024	8,582,890
23	NUSA TENGGARA BARAT	2022	5,293,087
		2023	5,368,329
		2024	5,538,329
24	NUSA TENGGARA TIMUR	2022	5,570,444
		2023	5,850,641
		2024	7,994,706
25	KEPULAUAN RIAU	2022	4,046,212
		2023	3,919,807
		2024	3,986,943
26	BENGKULU	2022	3,147,376
		2023	2,816,001
		2024	3,067,274
27	LAMPUNG	2022	7,481,835
		2023	7,355,451
		2024	7,652,495
28	BANGKA BELITUNG	2022	2,996,476
		2023	2,624,707
		2024	3,108,627
29	RIAU	2022	5,244,690
		2023	4,820,948
		2024	4,534,149
30	JAMBI	2022	9,953,601
		2023	9,753,498
		2024	10,831,506
31	SUMATERA BARAT	2022	6,954,112
		2023	6,701,552
		2024	6,800,124
32	SUMATERA SELATAN	2022	8,771,607

33	ACEH	2023	8,704,391
		2024	9,132,749
		2022	18,709,340
		2023	17,288,018
		2024	16,752,054
		2022	14,060,766
34	SUMATERA UTARA	2023	13,252,957
		2024	13,956,499

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi- provinsi di Indonesia menunjukkan variasi dalam total APBD mereka selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan APBD dari Rp. 9.631.040 juta pada tahun 2022 menjadi menjadi Rp12.548.451 juta pada tahun 2024. Sementara itu, provinsi Banten mengalami fluktuasi yang signifikan dari Rp12.281.829 juta pada tahun 2022 menjadi hanya Rp12.122.344 juta pada tahun 2023, sebelum naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang berbeda di setiap provinsi yang dapat memengaruhi alokasi dana APBD dan menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Berikut hasil normalitas penelitian ini.

Tabel 4.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.39539250
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.080
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.546
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.534
	Upper Bound	.559

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 atau lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang dianalisis berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini,

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.297	.117		2.544	.012
	Pajak	6.961E-7	.000	.227	2.998	.103
	APBN	-6.180E-12	.000	-.013	-.174	.862

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen yaitu APBN dan Pajak memiliki *p-value* yaitu 0,103 dan 0,862 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

1. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada $df\ 1 = n - k - 1$ atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berikut hasil uji t pada penelitian ini,

Tabel 4.5 Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.445	.166		14.701	.000
	Pajak	7.046E-7	.000	.163	2.130	.035
	APBN	2.629E-11	.000	.040	.518	.605

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Kemudian secara uji parsial menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak sebesar 2,130 dan dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini

sebesar 1,660 maka nilai t_{hitung} variabel pajak lebih besar dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau $2,130 > 1,660$ dan nilai $p-value$ atau $sig.$ variabel pajak sebesar 0,035 atau kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan tabel uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel APBN sebesar 0,518 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,660 maka nilai t_{hitung} variabel APBN lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau variabel APBN sebesar $0,518 < 1,660$ dan nilai $p-value$ atau $sig.$ variabel APBN sebesar 0,605 atau lebih besar dari 0,05 ($0,605 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Serta Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Berikut hasil uji t pada penelitian ini,

Tabel 4.6 Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.790	2	1.895	2.507	.085 ^b
	Residual	126.231	167	.756		
	Total	130.021	169			

1. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
2. Predictors: (Constant), APBN, Pajak

Berdasarkan tabel uji F tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,507 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 3,05 maka nilai F_{hitung} model tersebut lebih besar dari nilai F_{tabel} yang digunakan atau $2,507 < 3,05$ kemudian nilai $p-value$ atau $sig.$ sebesar 0,085 atau lebih besar dari 0,05 ($0,085 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Surjaningsih G. A. Diah Utari Budi Trisnanto “*Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi*”(2019) Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ndari Surianingsih G.A. Diah Utari Budi Trisnanto yaitu hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa *shock* kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara *shock* kenaikan pajak berdampak negatif.

Kenaikan pendapatan pajak daerah ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional dan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya fiskal untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Variabel pajak yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

di Indonesia mengindikasikan bahwa kenaikan tingkat pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam teori ekonomi, dalam praktiknya pengaruhnya belum tentu signifikan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti permintaan dan penawaran agregat, kebijakan moneter, serta faktor eksternal seperti harga minyak dunia. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah mengatur pajak dengan hati-hati, memperhatikan dampaknya terhadap kebijakan moneter, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Dengan demikian, variabel pajak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya belum tentu signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia.

4.2.2 Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Ketidak berpengaruh variabel APBN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2020-2024 disebabkan oleh APBN mencakup berbagai komponen seperti pendapatan dan pengeluaran pemerintah, yang memiliki dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian implementasi kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran yang cermat dapat mengurangi potensi dampak negatif APBN pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun variabel APBN tidak terlihat berpengaruh secara langsung pada pertumbuhan ekonomi dalam data periode tersebut, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk memahami hubungan ini dengan benar, mengingat beragam faktor yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang anggaran yang disusun haruslah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan setiap

organisasi atau lembaga tersebut untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam Renstra organisasi atau kelembagaan tersebut. Renstra inilah yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang nantinya akan dicapai. Ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan manajemen pertumbuhan ekonomi yang cermat di tingkat daerah untuk memastikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup semua sumber pendapatan negara, seperti pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan dana lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya.

Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran akan tetapi, apabila perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh Pajak Terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak sebesar 2,130 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel pajak lebih besar dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau $2,130 > 1,974$ dan nilai p -value atau sig. variabel pajak sebesar 0,035 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Pengaruh APBN Terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel APBN sebesar 0,605 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,974 maka nilai t_{hitung} variabel APBN lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang digunakan atau variabel APBN sebesar $0,605 < 1,974$ dan nilai p -value atau sig. variabel APBN sebesar 0,605 atau lebih besar dari 0,05 ($0,605 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel APBN tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sehingga dilakukan uji F (Pengujian Secara Simultan), uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,507 dan apabila nilai t_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 3,05 maka nilai F_{hitung} model tersebut lebih besar dari nilai

F_{tabel} yang digunakan atau $2,507 < 3,05$ kemudian nilai $p\text{-value}$ atau sig. sebesar 0,085 atau lebih besar dari 0,05 ($0,085 > 0,05$) sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak dan APBN berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
2. Bagi masyarakat untuk menyiapkan dana darurat dan mencari penghasilan tambahan.
3. Masyarakat untuk mengatur pengeluaran dan menabung supaya mencegah terjadinya penghambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nurul.(2019). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan inflasi. Bengkalis: STIE Syariah Bengkalis.
- Aristina, Khusni., dkk. (2020). Analisis Kebijakan Moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018. Magelang: Universitas Tidar.
- Cahyani. (2021). Pengaruh APBN Kebijakan Fiskal Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemic. Salam: *islamic economics jurnal*.2(2). 50-63
- Harsasto, widayanti, w., astute, p., martini, r., & H.N.R. (2021). Ekonomi Pemerintahan. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Herdaleny, adelia. (2019). Analisis Kapasitas Fiskal Dan Perannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Jember: Universitas Jember.
- Jumlah Data Penduduk Indonesia, diakses pada tanggal 01 september 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>.
- Kartika. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Pelanggan Go-Jek Di Perguruan Tinggi Negeri Kota Malang). Malang: Universitas Islam Negeri (UIN).
- Kebijakan Fiskal: Definisi,Tujuan,Jenis Dan Contohnya., Diakses Pada Tanggal 01 September 2023. <https://www.rumah.com/panduan-properti/kebijakan-fiskal-74814>.
- Listyowati, L. (2020). Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1988-2017. 1-13.
- Mankiw, N.G.,Quah, E., & Wilson, P. (2014). Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia. Jakarta: Salemba Empat.
- Ma'ruf, A. & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi: Determinan Dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Vol 9 no. 1.

- Pengertian Pajak, Fungsi Pajak Dan Jenis-Jenisnya. Di Akses Pada Tanggal 01 September 2023.
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>.
- Salim. (2019). Hukum Investasi Indonesia, hlm:31-33
- Seri Ekonomi Makro – Teori Pertumbuhan Ekonomi, Diakses Pada Tanggal 01 September 2023.
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-seri-ekonomi-makro-ekonomi-teori-pertumbuhan-ekonomi/detail/>
- Sihaloho, Esto Dariatno. (2020). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vector Autogressive. *Forum Ekonomi*.22(2). 202-209.
- Simorangkir, i. (2020). Koordinasi Kebijakan Moneter Dan Fiscal Di Indonesia: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Game Theory. *Bulletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5-30.
- Sirait, y.m. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jember: Universitas Jember.
- Sugiyono. (2020). Teknik Sampling Jenuh, Diakses Pada Tanggal 07 September 2023. <https://eprints.ummi.ac.id/5/BAB%20III.pdf>.
- Sukirno, Sadono. (2020) Makroekonomi Modern: Pertkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru Raja. Grafindo Pustaka: Jakarta.
- Riichard, & Toly, A.A. (2019). Analisis Korelasi Inflasi, *Economic Growth, Economic Structure Dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue* Di Negara-Negara Asean, 3(2), 1-2.
- Zakik. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiscal Terhadap Tingkat Pendapatan Perkapita. *Media Trend*. Vol.8 no.1, issn:59-70.
- Abd Kadir Arno. dkk. (2020). Empirical Evidence On The Impact Of Monetary Policy On National Economic Growth
- Sukirman. dkk. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2
- Ishak. dkk. (2024). Jurnal. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak.

Lampiran Data

Data 1 Kenaikkan Penerimaan pajak dari tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI	TAHUN	KENAIKAN PAJAK (RUPIAH)
1	SULAWESI SELATAN	2022	6,575,400
		2023	6,863,700
		2024	7,172,400
2	SULAWESI TENGAH	2022	2,433,600
		2023	2,538,200
		2024	2,647,600
3	SULAWESI TENGGARA	2022	3,836,300
		2023	3,911,500
		2024	3,989,900
4	SULAWESI BARAT	2022	3,325,200
		2023	3,379,700
		2024	3,437,400
5	SULAWESI UTARA	2022	3,134,900
		2023	3,267,500
		2024	3,408,700
6	GORONTALO	2022	3,032,400
		2023	3,076,700
		2024	3,124,100
7	MALUKU	2022	3,361,800
		2023	3,419,700
		2024	3,482,000
8	MALUKU UTARA	2022	3,836,300
		2023	3,870,800
		2024	3,906,800
9	PAPUA BARAT	2022	2,015,300
		2023	2,098,400
		2024	2,184,200
10	PAPUA	2022	3,237,200
		2023	3,367,500
		2024	3,501,600
11	KALIMANTAN BARAT	2022	5,776,600
		2023	6,026,400

		2024	6,291,400
12	KALIMANTAN TENGAH	2022	4,233,400
		2023	4,413,700
		2024	4,606,100
13	KALIMANTAN SELATAN	2022	6,388,900
		2023	6,663,900
		2024	6,957,100
14	KALIMANTAN TIMUR	2022	7,854,100
		2023	8,187,700
		2024	8,540,600
15	KALIMANTAN UTARA	2022	2,913,300
		2023	2,991,700
		2024	2,072,600
16	DKI JAKARTA	2022	5,838,700
		2023	5,107,400
		2024	5,510,200
17	JAWA BARAT	2022	3,689,100
		2023	3,007,400
		2024	3,384,600
18	JAWA TENGAH	2022	2,356,100
		2023	2,174,900
		2024	2,050,900
19	DI YOGYAKARTA	2022	9,482,800
		2023	9,864,500
		2024	9,621,800
20	JAWA TIMUR	2022	3,010,500
		2023	3,394,800
		2024	3,827,400
21	BANTEN	2022	3,711,900
		2023	4,278,800
		2024	4,873,600
22	BALI	2022	6,356,800
		2023	6,629,200
		2024	6,919,100
23	NUSA TENGGARA BARAT	2022	2,964,400
		2023	3,091,200
		2024	3,226,100

24	NUSA TENGGARA TIMUR	2022	2,324,700
		2023	2,418,000
		2024	2,515,500
25	KEPULAUAN RIAU	2022	2,543,400
		2023	2,645,200
		2024	2,749,900
26	BENGKULU	2022	2,300,800
		2023	2,396,400
		2024	2,494,900
27	LAMPUNG	2022	4,949,700
		2023	5,161,600
		2024	5,386,800
28	BANGKA BELITUNG	2022	2,135,300
		2023	2,221,100
		2024	2,309,000
29	RIAU	2022	3,516,750
		2023	3,695,650
		2024	3,807,600
30	JAMBI	2022	5,292,500
		2023	5,516,400
		2024	5,751,400
31	SUMATERA BARAT	2022	5,667,300
		2023	5,912,800
		2024	6,171,100
32	SUMATERA SELATAN	2022	9,634,900
		2023	10,014,800
		2024	10,414,850
33	ACEH	2022	6,845,700
		2023	7,120,350
		2024	7,409,550
34	SUMATERA UTARA	2022	5,667,300
		2023	5,912,800
		2024	6,171,100

Data 2 APBN dari tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI	TAHUN	TOTAL APBD (JUTA RUPIAH)
1	SULAWESI SELATAN	2022	9,631,040
		2023	10,374,681
		2024	12,548,451
2	SULAWESI TENGAH	2022	4,567,747
		2023	4,623,258
		2024	4,362,165
3	SULAWESI TENGGARA	2022	4,672,660
		2023	4,567,359
		2024	5,260,192
4	SULAWESI BARAT	2022	2,164,144
		2023	2,140,482
		2024	2,108,767
5	SULAWESI UTARA	2022	4,372,348
		2023	4,640,155
		2024	4,167,776
6	GORONTALO	2022	2,002,198
		2023	1,948,827
		2024	1,922,519
7	MALUKU	2022	3,137,388
		2023	3,384,152
		2024	4,021,218
8	MALUKU UTARA	2022	2,808,345
		2023	2,750,345
		2024	3,379,037
9	PAPUA BARAT	2022	12,420,607
		2023	11,572,152
		2024	7,744,110
10	PAPUA	2022	17,248,619
		2023	15,527,559
		2024	15,878,964
11	KALIMANTAN BARAT	2022	6,304,659
		2023	6,242,375

		2024	7,090,493
12	KALIMANTAN TENGAH	2022	5,680,470
		2023	5,377,960
		2024	5,020,296
13	KALIMANTAN SELATAN	2022	7,397,118
		2023	6,879,065
		2024	5,526,165
14	KALIMANTAN TIMUR	2022	13,637,013
		2023	12,382,489
		2024	11,616,186
15	KALIMANTAN UTARA	2022	2,797,918
		2023	2,778,925
		2024	2,385,057
16	DKI JAKARTA	2022	74,077,191
		2023	61,469,821
		2024	84,196,594
17	JAWA BARAT	2022	39,199,187
		2023	39,376,316
		2024	44,715,066
18	JAWA TENGAH	2022	27,490,557
		2023	26,513,084
		2024	27,383,751
19	DI YOGYAKARTA	2022	6,173,815
		2023	6,035,224
		2024	6,214,072
20	JAWA TIMUR	2022	38,411,057
		2023	36,022,542
		2024	33,044,298
21	BANTEN	2022	12,281,829
		2023	12,122,344
		2024	16,013,254
22	BALI	2022	7,350,130
		2023	6,550,978
		2024	8,582,890
23	NUSA TENGGARA BARAT	2022	5,293,087
		2023	5,368,329
		2024	5,538,329

24	NUSA TENGGARA TIMUR	2022	5,570,444
		2023	5,850,641
		2024	7,994,706
25	KEPULAUAN RIAU	2022	4,046,212
		2023	3,919,807
		2024	3,986,943
26	BENGKULU	2022	3,147,376
		2023	2,816,001
		2024	3,067,274
27	LAMPUNG	2022	7,481,835
		2023	7,355,451
		2024	7,652,495
28	BANGKA BELITUNG	2022	2,996,476
		2023	2,624,707
		2024	3,108,627
29	RIAU	2022	5,244,690
		2023	4,820,948
		2024	4,534,149
30	JAMBI	2022	9,953,601
		2023	9,753,498
		2024	10,831,506
31	SUMATERA BARAT	2022	6,954,112
		2023	6,701,552
		2024	6,800,124
32	SUMATERA SELATAN	2022	8,771,607
		2023	8,704,391
		2024	9,132,749
33	ACEH	2022	18,709,340
		2023	17,288,018
		2024	16,752,054
34	SUMATERA UTARA	2022	14,060,766
		2023	13,252,957
		2024	13,956,499

Lampiran Analisis Data

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.39539250
Most Extreme Differences	Absolute		.098
	Positive		.080
	Negative		-.098
Test Statistic			.098
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.546
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.534
		Upper Bound	.559

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.297		2.544	.012
	Pajak	6.961E-7	.227	2.998	.103
	APBN	-6.180E-12	-.013	-.174	.862

a. Dependent Variable: Abs_RES

Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	2.445	.166	14.701	.000
	Pajak	7.046E-7	.000	.163	.035
	APBN	2.629E-11	.000	.040	.605

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.790	2	1.895	2.507	.085 ^b
	Residual	126.231	167	.756		
	Total	130.021	169			

3. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

4. Predictors: (Constant), APBN, Pajak